



Tata Kelola Pendidikan Islam Moderat di PTKIS: Sebuah Model Manajemen Penguatan Moderasi Beragama

Akhmad Shunhaji¹, Mamluatun Nafisah², Miftakhul Arif³

¹Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

²Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

³STAI Fatahillah Serpong, Tangerang Selatan, Indonesia

¹akhmadshunhaji@ptiq.ac.id

Abstract

Religious moderation has become a strategic issue in Islamic higher education, as universities not only transmit knowledge but also shape students' value orientations and socio-religious practices. However, in Private Islamic Religious Universities (PTKIS), religious moderation is often treated as a normative agenda or occasional program, limiting its sustainability. This study aims to analyze how religious moderation is institutionalized within PTKIS governance and to formulate an operational and sustainable management model for strengthening religious moderation. The research employed a qualitative multi-site case study approach across three PTKIS in Banten during the 2023/2024 academic year. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and institutional document analysis, and were examined using thematic analysis with source and technique triangulation. The findings reveal that religious moderation becomes effective and sustainable when embedded within an integrated governance system through six key components: strategic orientation in institutional planning, academic and student affairs policies, instructional and academic forum design, structured student organization cadre development, participatory leadership as symbolic capital, and systematic monitoring and evaluation mechanisms. Moderation anchored in institutional structures, academic culture, and consistent leadership practices proves more durable than programmatic or ceremonial approaches. In conclusion, religious moderation in PTKIS is fundamentally a matter of institutional governance rather than merely a pedagogical concern. An integrated management model combining policy alignment, participatory leadership, dialogical campus culture, and continuous evaluation constitutes a prerequisite for cultivating a moderate religious habitus and sustaining campus harmony and stability.

Keywords: *Islamic Education Governance; Religious Moderation; Management Model; PTKIS; Campus Harmony*

Abstrak

Moderasi beragama menjadi isu strategis dalam pendidikan tinggi Islam karena kampus tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk orientasi nilai dan praktik sosial keagamaan mahasiswa. Namun, penguatan moderasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) kerap diposisikan sebagai agenda normatif atau program insidental sehingga keberlanjutannya belum terjamin. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana moderasi beragama dilembagakan dalam tata kelola PTKIS serta merumuskan model manajemen penguatan moderasi yang operasional dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus multi-situs pada tiga PTKIS di Banten selama tahun akademik 2023/2024. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kelembagaan, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa moderasi beragama efektif dan berkelanjutan ketika diintegrasikan dalam sistem tata kelola melalui enam komponen utama: arah strategis dalam rencana strategis institusi, kebijakan akademik dan kemahasiswaan, desain pelaksanaan pembelajaran dan forum ilmiah, pembinaan kaderisasi organisasi mahasiswa, kepemimpinan partisipatif sebagai modal simbolik, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi. Moderasi yang dilekatkan pada struktur kebijakan, budaya akademik, dan praktik kepemimpinan terbukti lebih stabil dibanding pendekatan programatik atau seremonial. Simpulannya, moderasi beragama di PTKIS merupakan persoalan tata kelola institusional, bukan semata isu pedagogis. Model manajemen berbasis integrasi kebijakan, kepemimpinan, budaya dialogis, dan evaluasi berkelanjutan menjadi prasyarat terbentuknya habitus keagamaan moderat serta terjaganya harmoni dan stabilitas kehidupan kampus.

Kata Kunci: Tata Kelola Pendidikan Islam; Moderasi Beragama; Model Manajemen; PTKIS; Harmoni Kampus

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, moderasi beragama dipahami sebagai isu strategis dalam pendidikan tinggi. Kampus bukan hanya ruang transmisi pengetahuan. Kampus juga membentuk disposisi, orientasi nilai, dan cara pandang sosial keagamaan generasi muda. Nilai keberagamaan terbentuk dalam praktik akademik sehari-hari. Praktik ini berlangsung melalui relasi pedagogis, budaya organisasi, dan mekanisme kelembagaan. Dampaknya dapat memperkuat kohesi sosial. Namun, dampak itu juga dapat memicu eksklusivisme jika tidak dikelola secara tepat. Perspektif praksis sosial menegaskan bahwa nilai tidak hanya diajarkan. Nilai direproduksi melalui habitus, arena, dan modal yang bekerja di dalam institusi (Afwadzi, Sumbulah, Ali & Qudsy, 2024).

Dalam konteks Indonesia yang demokratis dan majemuk, moderasi beragama tidak cukup dipahami sebagai etika individual. Moderasi beragama menjadi prasyarat bagi keberlanjutan harmoni sosial dan integrasi kebangsaan. Karena itu, perguruan tinggi memikul tanggung jawab strategis. Kampus perlu memastikan pendidikan keagamaan tidak berkembang menjadi sikap rigid. Kampus juga harus mencegah pola yang antagonistik dan menutup ruang dialog. Pada tingkat ini, moderasi beragama perlu dibaca sebagai persoalan institusional. Kampus harus membangun iklim akademik yang inklusif. Kampus perlu membentuk kebijakan yang konsisten.

Kampus juga harus mengorganisasi pengalaman belajar agar nilai moderasi beragama menjadi praktik kelembagaan yang nyata. Nilai tersebut perlu hadir sebagai budaya hidup institusi, bukan sekadar slogan (Junaedi, 2019; Malik, Alwi & Hindi, 2021; Muhlisin, Kholis & Rini, 2023). Secara khusus, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) berada pada posisi krusial. PTKIS sering menjadi titik temu antara tradisi keilmuan Islam, dinamika sosial-politik kontemporer, serta keragaman latar belakang pendidikan dan afiliasi keagamaan mahasiswa (Nasution, Suparman & Nurhayati, 2024).

Dalam praktiknya, PTKIS juga kerap menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga tuntutan penguatan moderasi beragama tidak cukup dijawab dengan pendekatan normatif-kurikuler saja, melainkan membutuhkan desain tata kelola yang realistis, adaptif, dan berkelanjutan (Aguslani, 2025). Sejumlah temuan berbasis survei dan riset pendidikan menunjukkan bahwa lingkungan mahasiswa tidak sepenuhnya steril dari kecenderungan intoleransi atau eksklusivisme. Survei nasional menunjukkan 30,16% mahasiswa berada pada toleransi rendah/sangat rendah, dan pada aspek perilaku 11,22% berada pada kategori rendah/sangat rendah (Khainuddin, Fathoni, Huda & Septian, 2025; Nugraheni, Firmansyah & Dian, 2023).

Hasil ini juga didukung oleh *survey* kampus-kampus swasta di Bandung. Dari 845 mahasiswa yang menjadi responden, 13% berada pada kategori toleransi rendah (Khainuddin et al., 2025; Septian, Supriatna, Nurihsan, Budiman & Siddik, 2024). Fakta ini menantang asumsi bahwa pendidikan Islam secara otomatis melahirkan keberagamaan yang moderat, sekaligus menegaskan perlunya memeriksa faktor-faktor kelembagaan yang membentuk pengalaman keberagamaan mahasiswa di kampus. Di titik ini, moderasi beragama tidak memadai dipahami sebagai “produk konten ajar” semata. Moderasi lebih tepat dibaca sebagai hasil proses sosial-kelembagaan yang kompleks: kepemimpinan, kultur akademik, sistem penjaminan mutu, praktik pembelajaran, pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan, hingga mekanisme dukungan dan pengendalian (*monitoring-evaluasi*). Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa program/struktur kelembagaan moderasi di perguruan tinggi dapat menjadi rapuh ketika tidak memiliki konsep implementasi, mekanisme kerja, dan dukungan organisasi yang jelas (Razak, Rasyid, Putra, Khatami & Muntazhar, 2025; Yudiawan, Rasyid, Arifin, Ahmadi & Syahrul, 2024). Sejauh ini, kajian moderasi beragama di perguruan tinggi cenderung dominan pada pendekatan pedagogis (Ilmi, 2022; Prasetyo, Fauziah & Syafii, 2025). Nilai moderasi berada dalam mata kuliah, model pembelajaran, penguatan karakter, atau literasi digital mahasiswa.

Contoh riset menyoroti pengembangan kurikulum moderasi, kelas/modul khusus, atau strategi pembelajaran sebagai instrumen utama (Mukhibat, Effendi, Setyawan & Sutoyo, 2024; Prasetyo, Fauziah & Syafii, 2025). Kajian pedagogis ini penting, tetapi sering membuat moderasi beragama dipahami sebagai “urusan kelas” (*teaching domain*), bukan “urusan sistem” (*governance domain*) (Chotimah, Qudsy & Yusuf, 2025). Penelitian ini menawarkan penajaman: membaca moderasi beragama sebagai persoalan tata kelola (*governance*) (Rozikin, Suradinata, Mulyati & Achmad, 2025; Junaedi, 2019).

Artinya, pertanyaan kuncinya bergeser dari “nilai apa yang diajarkan?” menjadi “bagaimana nilai moderasi dikelola, dilembagakan, dan direproduksi melalui kebijakan, kepemimpinan, budaya akademik, dan perangkat manajemen kampus?” Studi tentang PTKIS di Aceh, misalnya, menunjukkan bagaimana ruang dialog lintas identitas dapat dibentuk lewat program kelembagaan dan wadah khusus kampus yang berarti moderasi bekerja melalui desain institusional, bukan hanya materi ajar (Sandra, Rahmalia, Rijal & Furqan, 2024).

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pendidikan Islam moderat di PTKIS dengan memadukan perspektif manajemen pendidikan Islam dan teori praksis sosial Pierre Bourdieu: (1) mengkaji bagaimana moderasi beragama dikelola dan dilembagakan dalam sistem tata kelola PTKIS; serta (2) merumuskan model manajemen penguatan moderasi beragama yang operasional dan kontekstual untuk menjaga harmoni serta stabilitas kehidupan kampus.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretik dan praktis. Secara teoretik, ia memposisikan moderasi beragama sebagai isu tata kelola dan praksis sosial bukan sekadar isu normatif atau kurikuler. Secara praktis, model yang dirumuskan diharapkan membantu pimpinan PTKIS menyusun perangkat manajemen yang terukur: penataan kebijakan, arsitektur program, mekanisme pelaksanaan, serta indikator evaluasi agar moderasi beragama hadir sebagai praktik institusional yang konsisten dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus multi-situs yang dilaksanakan pada tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Provinsi Banten, yaitu STISNU Nusantara Tangerang, STAI Fatahillah Serpong, dan STAI Babunnajah Pandeglang, selama dua semester pada tahun akademik

2023/2024. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder; data primer diperoleh dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kelembagaan seperti rencana strategis, pedoman akademik, pedoman kemahasiswaan, arsip kegiatan, serta laporan evaluasi program. Informan ditentukan secara purposif berdasarkan posisi, kewenangan, dan keterlibatan dalam tata kelola serta penguatan moderasi beragama, kemudian dikembangkan melalui teknik *snowball* untuk memperluas variasi perspektif. Instrumen penelitian adalah peneliti sebagai instrumen utama yang didukung pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi partisipatif, dan format telaah dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap praktik akademik dan kemahasiswaan, serta studi dokumentasi untuk menelusuri konsistensi antara kebijakan formal dan praktik aktual. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengodean, kategorisasi, penemuan pola lintas kasus, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan membandingkan temuan antar lokasi penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan konsistensi serta keterlacakan bukti empiris.

Hasil dan Pembahasan

1. Tata Kelola Pendidikan Islam Moderat di PTKIS

Temuan lintas kasus menunjukkan bahwa moderasi beragama berjalan efektif ketika ia hadir sebagai mekanisme tata kelola, bukan sekadar tema program. Di tiga PTKIS, moderasi beragama bekerja melalui empat mekanisme utama: arah strategis, perangkat kebijakan, desain pelaksanaan, dan pengendalian. Pertama, moderasi beragama menjadi bagian dari arah strategis. Nilai moderasi diturunkan ke rencana strategis tahun akademik 2023/2024 sebagai acuan prioritas program, termasuk penataan agenda kemahasiswaan dan budaya kampus. “Moderasi kami masukkan ke renstra. Jadi, setiap program harus sejalan dengan itu” (P1-N).

Kedua, moderasi beragama dilekatkan pada perangkat kebijakan akademik dan kemahasiswaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai batas etika, standar komunikasi akademik, dan rambu kegiatan organisasi kemahasiswaan agar tidak memproduksi eksklusivisme. “Kami tidak membatasi perbedaan pendapat, tetapi kami tegas pada cara menyampaikan yang merendahkan kelompok lain” (P3-F). Model ini juga berlaku di negara lain (Elhakim, 2024). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Ardiansyah, Mukarom & Nugraha, 2024).

Ketiga, moderasi beragama dioperasionalkan melalui desain pelaksanaan yang tampak dalam rutinitas akademik dan pembinaan organisasi mahasiswa. Di tingkat praktik, moderasi muncul dalam format diskusi kelas, forum ilmiah, serta pembinaan ormawa yang diarahkan pada kolaborasi dan literasi kebangsaan. Menurut D1-B selaku narasumber menyatakan kalau diskusi, kami wajibkan adab akademik. Kritik boleh, menghakimi tidak. Keempat, moderasi beragama dijaga melalui pengendalian dan evaluasi.

PTKIS yang diteliti menguatkan keberlanjutan moderasi melalui evaluasi kegiatan, klarifikasi cepat saat muncul gesekan, dan pembinaan kaderisasi organisasi mahasiswa. Mekanisme ini mencegah moderasi menjadi simbolik. Menurut D2-N selaku narasumber menyatakan setelah kegiatan, ada evaluasi. Kalau ada materi yang mengarah eksklusif, kami koreksi. Sejumlah studi mendukung temuan ini bahwa moderasi cenderung kuat bila diikat oleh sistem tata kelola dan kebijakan (Armayanti & Nasution, 2025; Junaidi & Tanshzil, 2025).

Namun, studi lain menunjukkan sisi lemahnya. Implementasi moderasi di beberapa kampus sering berjalan “kultural” tetapi tanpa kebijakan formal dan evaluasi

terstruktur, sehingga keberlanjutannya bergantung pada figur dan situasi (Wirian, Nasution & Farabi, 2025). Penelitian juga mengkritik kecenderungan moderasi menjadi agenda programatik yang lebih dekat pada logika keamanan dan seremonial, bukan pembentukan kapasitas institusi (Jati, Syamsurijal, Halimatusa'diah, Aji & Yilmaz, 2024).

2. Kepemimpinan Sebagai Modal Simbolik Moderasi Beragama

Kepemimpinan muncul sebagai faktor penentu karena ia menyediakan modal simbolik yang membuat moderasi beragama diakui sebagai standar sah dalam arena kampus (Bourdieu, 1984). Modal simbolik pimpinan tidak berhenti pada otoritas struktural, tetapi tampak dalam keteladanan, distribusi akses, dan konsistensi keputusan. Ada tiga praktik kepemimpinan yang paling menentukan.

- a. Penetapan batas etika akademik. Pimpinan menegaskan batas antara perbedaan pandangan dan praktik yang merendahkan pihak lain. Menurut P1-N selaku narasumber menyatakan kami tidak menutup perbedaan, tetapi kami menutup pintu pada narasi yang memecah dan menstigma.
- b. Distribusi ruang yang adil. Pimpinan memastikan ormawa dibina secara setara, tidak didominasi satu kelompok, dan diarahkan pada program lintas organisasi. Menurut P2-F selaku narasumber menyatakan semua ormawa punya ruang yang sama, tetapi programnya harus mendidik, bukan menguatkan fanatisme.
- c. Intervensi cepat saat muncul gesekan. Pimpinan membangun prosedur klarifikasi dan mediasi agar isu sensitif tidak berubah menjadi konflik identitas. Menurut P1-B selaku narasumber menyatakan kalau ada gesekan, kami pertemuan, kami luruskan, lalu kami buat kesepakatan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menilai moderasi sering tidak stabil jika hanya bergantung pada praktik informal. Beberapa studi menunjukkan moderasi bisa tampak berjalan, tetapi menjadi rapuh ketika tidak ditopang kebijakan formal dan mekanisme evaluasi (Wirian, Nasution & Al Farabi, 2025). Studi lain bahkan menilai implementasi moderasi di institusi pendidikan berisiko jatuh pada dimensi kognitif dan simbolik, sehingga yang kuat adalah narasinya, bukan transformasi kelembagaannya (Chotimah et al., 2025).

3. Habitus Akademik dan Arena Praksis Moderasi

Moderasi beragama menguat ketika kampus menyediakan arena internalisasi yang membuat nilai moderasi menjadi pengalaman sosial berulang. Di tiga PTKIS, arena yang paling konsisten membentuk habitus moderat dapat dipetakan ke empat ruang.

- a. Ruang kelas. Moderasi diproduksi melalui relasi pedagogis dialogis, disiplin argumentasi, dan adab akademik. Menurut M1-N selaku narasumber menyatakan Dosen membolehkan beda pendapat, tetapi harus berbasis rujukan dan tidak menyerang identitas.
- b. Forum akademik kampus. Seminar, diskusi tematik, dan kuliah umum menjadi arena negosiasi makna yang menempatkan perbedaan sebagai debat ilmiah, bukan konflik identitas (Bourdieu, 1984; Mukhibat et al., 2024). Menurut M2-B selaku narasumber menyatakan di forum kampus, kami belajar menyampaikan kritik tanpa menyalahkan kelompok lain.
- c. Budaya kampus. Kebiasaan komunikasi, etika interaksi, dan rutinitas kolaboratif membentuk habitus moderat secara gradual. Menurut D1-F selaku narasumber menyatakan di sini, cara bicara itu dijaga. Kalau ada isu sensitif, biasanya dibawa ke ruang musyawarah.

d. Kaderisasi organisasi kemahasiswaan. Ini arena paling strategis sekaligus paling rawan. Kaderisasi yang dibina dan diawasi dengan panduan institusi menekan kecenderungan eksklusivisme. Menurut M1-N selaku narasumber menyatakan materi kaderisasi bukan hanya organisasi. Ada etika dialog, kebangsaan, dan program lintas ormawa.

Sejumlah studi mendukung bahwa moderasi di kampus efektif ketika ditopang ruang dialog dan praktik inklusif (Tuala & Wachidah, 2024). Namun ada temuan kontra bahwa pemahaman moderasi tidak otomatis selaras dengan orientasi gerakan mahasiswa atau kaderisasi organisasi, sehingga arena kemahasiswaan perlu tata kelola yang jelas (Harimurti, 2025).

4. Model Manajemen Penguatan Moderasi Beragama di PTKIS

Agar aplikatif, model disajikan sebagai tabel konseptual. Model ini menekankan bahwa moderasi beragama perlu punya jalur kerja yang jelas dari perencanaan sampai evaluasi.

Tabel 1. Model Manajemen Penguatan Moderasi Beragama di PTKIS

Komponen	Tujuan operasional	Mekanisme kunci	Contoh praktik di PTKIS	Bukti minimal
Arah strategis	Menjadikan moderasi sebagai orientasi kelembagaan	Integrasi ke renstra 2023/2024	Target program dan budaya kampus dirujuk ke renstra	Renstra, rencana kerja, indikator
Kebijakan	Menetapkan standar etika dan batas praktik	Pedoman akademik dan kemahasiswaan	Rambu diskusi, SOP kegiatan, pedoman ormawa	Dokumen kebijakan dan sosialisasi
Pelaksanaan	Mengubah nilai menjadi praktik harian	Desain pembelajaran dan forum kampus	Diskusi kelas dialogis, forum ilmiah tematik	Jadwal, notulensi, dokumentasi
Arena kemahasiswaan	Menjadikan mahasiswa agen moderasi	Pembinaan dan pengawasan kaderisasi	Materi kaderisasi, program lintas ormawa	Modul kaderisasi, laporan pembinaan
Kepemimpinan	Menjamin legitimasi dan konsistensi	Teladan, distribusi akses, mediasi	Klarifikasi cepat konflik, musyawarah	Keputusan, berita acara, catatan mediasi
Pengendalian	Menjamin keberlanjutan	Evaluasi program dan tindak lanjut	Evaluasi kegiatan dan koreksi materi	Laporan evaluasi dan tindak lanjut

Kekuatan model ini adalah menutup kelemahan yang sering muncul dalam riset lain, yaitu moderasi berjalan sebagai praktik kultural tetapi tidak dilekatkan pada kebijakan dan evaluasi (Wirian et al., 2025). Model ini juga menanggapi kritik bahwa moderasi mudah menjadi simbolik jika berhenti pada wacana dan dimensi kognitif tanpa perangkat manajemen (Chotimah et al., 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) tidak efektif apabila dipahami sebagai program normatif atau agenda temporer, melainkan harus dilembagakan melalui tata kelola pendidikan Islam yang terintegrasi dan berkelanjutan. Moderasi beragama terbukti berfungsi sebagai orientasi nilai kelembagaan ketika diinternalisasikan secara konsisten dalam kebijakan akademik, praktik kepemimpinan, budaya kampus, serta arena praksis kemahasiswaan. Dengan menggunakan perspektif tata kelola pendidikan Islam dan teori praksis sosial Pierre Bourdieu, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan habitus keagamaan moderat merupakan hasil interaksi antara struktur kelembagaan, modal simbolik kepemimpinan, dan dinamika arena akademik. Model manajemen penguatan moderasi beragama yang ditawarkan menempatkan kepemimpinan partisipatif, pembentukan budaya dialogis, dan integrasi nilai moderasi dalam sistem manajemen kampus sebagai prasyarat utama keberlanjutan moderasi beragama. Dengan demikian, PTKIS memiliki posisi strategis sebagai arena institusional dalam membentuk keberagamaan moderat yang tidak hanya menjaga harmoni kampus, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., Sumbulah, U., Ali, N., & Qudsy, S. Z. (2024). Religious Moderation Of Islamic University Students In Indonesia: Reception Of Religious Texts. *HTS Theologies Studies/Theological Studies*, 80(1).
- Aguslani, A. (2025). Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Nasional: Studi Telaah terhadap Pendidikan Umum dan Keagamaan di Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 19(2), 106-118.
- Ardiansyah, A. A., Mukarom, M., & Nugraha, D. (2024). Analysis Of Religious Moderation Understanding Among University Students In West Java. *Harmoni*, 23(2), 273-290.
- Armayanti, Y., & Nasution, Z. (2025). Penguatan Moderasi Beragama Pada Pendidikan di Indonesia. *Journal of Islamic Education El Madani*, 5(1), 59-75.
- Bourdieu, P. (1984). Espace Social Et Genèse Des "Classes". *Actes de La Recherche En Sciences Sociales*, 52(1), 3-14.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic Of Practice*. Redwood City: Stanford University Press.
- Chotimah, C., Qudsy, S. Z., & Yusuf, M. (2025). Superficial Implementation Of Religious Moderation In Islamic Educational Management. *Cogent Education*, 12(1).
- Elhakim, A. (2024). The Intersection Of Promotion Policies, Research Habitus, And Capital Distribution: A Qualitative Case Study Of Two Higher Education Contexts In The United Arab Emirates. *Frontiers in Education*, 9, 1-13.
- Harimurti, S. M. (2025). The Understanding And Implementation Of Religious Moderation And National Insight By Islamic Student Movements. *Indonesian Journal of Islamic Religious Education*, 1(1), 11-26.
- Ilmi, N. B., & D. (2022). Typologies Of Religious Moderation One Of The Important Momentums For The Development Of Religion Designated 2019 As The Year Of Religious Moderation, 1 Which Indonesia, Both State Islamic Higher Education (PTKI) and Public Higher Education (PTU). *T. Journal Of Indonesian Islam*, 16(2), 1-22.
- Jati, W., Syamsurijal, S., Halimatusa'diah, H., Aji, G., & Yilmaz, I. (2024). Reevaluating Approaches to Religious Moderation at the Grassroots Level: The Role of Muslim Youth in Advancing Interfaith Dialogue. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 185-213.

- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182-186.
- Junaidi, J., & Tanshzil, S. W. (2025). Religious Moderation Research (2016-2025): Systematic Review And Bibliometric Mapping. *Harmoni*, 24(2), 185-214.
- Khainuddin, K., Fathoni, A., Huda, M. T., & Septian, R. D. (2025). Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Kediri. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 551-566.
- Malik, A., Alwi, M. H., & Hindi, M. A. (2021). Religious Moderation in Indonesian Islamic Scholars Articles. *International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHESS 2021)*, 626, 103-109.
- Muhlisin, M., Kholis, N., & Rini, J. (2023). Navigating The Nexus: Government Policies in Cultivating Religious Moderation Within State Islamic Higher Education. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 11(1), 207-236.
- Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development And Evaluation Of Religious Moderation Education Curriculum At Higher Education In Indonesia. *Cogent Education*, 11(1).
- Nasution, J. E., Suparman, S., & Nurhayati, B. (2024). Inclusive Islamic Education: The Role of Religious Moderation in Transformation of Islamic Education Institutions in Riau. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1664-1672.
- Nugraheni, Y. T., Firmansyah, A., & Dian, D. (2023). Pendidikan Spiritualitas-Religius Perspektif Al-Qur  n (Studi Tematik Kisah Zakariya). *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 12(1), 124-143.
- Prasetyo, G., Fauziah, Y. R., & Syafii, A. (2025). From Policy to Pedagogy: Religious Moderation as a Counter-Radicalization Strategy in Islamic Education A Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 233-251.
- Rozikin, I., Suradinata, E., Mulyati, D., & Achmad, M. (2025). Narrative Politics And The Limits Of Religious Governance In Decentralized Indonesia: The Case Of Hkbp Maranatha In Cilegon, Indonesia. *Penamas*, 38(1), 393-408.
- Razak, A., Rasyid, S. A., Putra, R. S., Khatami, M., & Muntazhar, A. (2025). From Concept to Practice. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 26(1), 81-96.
- Sandra, A., Rahmalia, T. L., Rijal, F., & Furqan, M. (2024). Ethnic Harmony in Islamic Higher Education: Building Religious Moderation in Aceh's Private Islamic Religious Universities. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 24(1), 29-54.
- Septian, M. R., Supriatna, M., Nurihsan, J., Budiman, N., & Siddik, R. R. (2024). Profil Toleransi Mahasiswa di Bandung. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 15(2), 183-188.
- Tuala, R. P., & Wachidah, N. R. (2024). Strategi Pembinaan Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 9(1), 75-86.
- Wirian, O., Nasution, H. B., & Al Farabi, M. (2025). Implementation of Religious Moderation in Higher Education. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 304-315.
- Yudiawan, A., Rasyid, M. R., Arifin, M., Ahmadi, A., & Syahrul, S. (2024). Moderate Student Construction: A Study on Moderate Islamic Views and Practices Among Intellectuals in Islamic Higher Education in West Papua. *Jurnal Penelitian*, 21(2), 165-179.